

Kontribusi Inflasi dan Upah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur

Stefanus H. Gusti Ma
e-mail: ephentino@gmail.com

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Flores

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh inflasi dan upah terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ngada. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Jenis data yang digunakan berupa gabungan dari data time series (periode 2016-2020) dan cross section (12 kecamatan) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada. Hasil dari penelitian ini, menunjukkan koefisien positif dari inflasi adalah 4386.046, ini berarti jika inflasi mengalami kenaikan 1%, maka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan sebesar 4.386,046%. Sedangkan koefisien upah sebesar 0.141, ini berarti jika upah mengalami peningkatan sebesar 1%, maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 14,1%. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan upah memberikan pengaruh yang simultan terhadap kemiskinan, sedangkan untuk pengaruh parsialnya inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap kemiskinan sedangkan upah memberika pengaruh terhadap kemiskinan.

Kata kunci: inflasi, upah dan kemiskinan

ABSTRACT: *This study analyzes how the influence of inflation and wages the number of poor people in Ngada Regency. The research method used in this data analysis uses ultiple linear regression analysis. The type of data used is a combination of time series data (2016-2020 period) and cross section (12 sub-districts) sourced from the Central Statistics Agency of Ngada Regency. The results of this study indicate that the positive coefficient of inflation is 4386,046, this means that if inflation increases by 1%, poverty will also increase by 4,386.046 %. While the wage coefficient is 0.141, this means that if wages increase by 1%, poverty will decrease by 14.1%. The conclusion of this study shows that inflation and wages have a simultaneous effect on poverty, while the partial effect of inflation has no effect on poverty while wages have an effect on poverty.*

Keyword: inflation, wages and poverty

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi momok bagi seluruh Negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia berkebutuhan dengan masalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin Propinsi NTT tahun 2020 sebanyak 1.117.530 jiwa dari total penduduk sebanyak 5.325.600 jiwa. Kolibu, Rumat, Engka (2019) mendefinisikan kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan diantaranya inflasi dan tingkat upah.

Inflasi merupakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok rumah tangga secara terus-menerus. Data mengenai kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator inflasi ini dibuat oleh para ahli yang disebut dengan Indeks Harga merupakan masalah yang kompleks yang tidak dapat terselesaikan hingga saat ini. Salah satu masalah yang ditimbulkan dari inflasi yakni kemiskinan. Pemerintah hanya dapat berupaya membuat berbagai kebijakan dan berbagai program dalam menanggulangi masalah kemiskinan sehingga dapat menurunkan dan menekan jumlah penduduk miskin secara bertahap dari tahun ke tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. Selain inflasi, kemiskinan juga dipengaruhi oleh kurangnya pendapatan dan asset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Menurut Ariska, Suntosa, Putry (2021) mengatakan bahwa Inflasi mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Keynes. Dikutip dari Kolibu, Rumat, dan Engka (2019) Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Dengan kata lain proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok-kelompok social yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang dapat disediakan masyarakat sehingga proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (*inflationary gap*).

Menurut Humbarsari & Inggit, 2016 Kemiskinan merupakan masalah klasik yang telah ada sejak manusia itu ada. Kemiskinan itu berwajah banyak dan akan terus menjadi persoalan dari masa ke masa. Kemiskinan adalah suatu masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti: tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender dan kondisi lingkungan (Susanto & Pangesti, 2020).

Octasari (2016) serta Sudirman & Andriani (2017) menyimpulkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penetapan upah minimum tidak hanya diterapkan pada lapangan kerja formal namun juga informal mampu meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan jika disertai peningkatan upah minimum secara terus menerus akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin secara signifikan. Dari pernyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa jika upah minimum ditingkatkan maka dapat mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain pendapatan masyarakat meningkat maka daya beli masyarakat pun ikut meningkat, begitupun sebaliknya jika pendapatan masyarakat

rendah akan berpengaruh terhadap daya beli yang semakin rendah pula. Hal ini

bisa berdampak pada tingkat kemiskinan.

Tabel 1
Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Upah Minimum Regional (UMP), dan Penduduk Miskin

Tahun	Jumlah Penduduk (juta jiwa)	Penduduk Miskin	% penduduk miskin	Inflasi	Upah minimum regional (UMR)
2016	156.011.000	19.760	12,69%	2,48	Rp1.425.000
2017	159.081.000	20.210	12,77%	2,00	Rp1.525.000
2018	161.196.000	20.790	12,94%	3,07	Rp1.660.000
2019	163.217.000	20.310	12,48%	0,67	Rp1.795.000
2020	165.254.000	20.620	12,51%	0,61	Rp1.950.000

Sumber: BPS Kabupaten Ngada (diolah)

Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngada dalam rentangan waktu dari tahun 2016-2020: tingkat inflasi mengalami penurunan pada kisaran 9 persen sampai dengan 78 persen, kenaikan tingkat inflasi terjadi pada tahun 2018 sebesar 54 persen. Tingkat Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 20 persen. Tahun 2016 UMR sebesar Rp 1.425.000 dan di tahun 2020 sebesar 1.950.000. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Ngada dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan sebesar 1 persen, tahun 2019 jumlah penduduk miskin Kabupaten Ngada mengalami penurunan 2 persen dari 20.790 jiwa menjadi 20.310.

Dari data yang dipaparkan tersebut, dapat kita asumsikan bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi bahkan cenderung menurun, sama halnya dengan tingkat UMR Kabupaten Ngada yang juga cenderung meningkat dalam kurun waktu 2016-2020 akan tetapi jumlah penduduk miskin lebih cenderung meningkat. Penurunan jumlah penduduk miskin hanya terjadi pada tahun 2019, itu pun tingkat penurunannya hanya sebesar 2 persen.

Berdasarkan data inflasi, upah minimum dan kemiskinan di Kabupaten Ngada dari tahun 2016-2020 (diperoleh dari BPS Kab. Ngada) diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh inflasi, dan upah terhadap kemiskinan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut R.Susanto dan I Pangesti (2020:2) inflasi merupakan kenaikan harga barang kebutuhan pokok rumah tangga yang secara terus menerus berlanjut. Data mengenai kenaikan harga-harga kebutuhan pokok ini dicatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikator inflasi ini dibuat oleh para ahli yang disebut dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara umum. Tingkat inflasi yang terjadi setiap tahun akan menambah tingkat kemiskinan yang tinggi, dan akan berpengaruh terhadap taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat. Bagi daerah yang perekonomiannya baik, tentu tingkat inflasi daerah tersebut rendah, namun ada juga yang mengalami tingkat inflasi yang sangat tinggi, yang disebut hiper inflasi (*hyperinflation*), Sri Yunni Bintang (2020:1).

Menurut Warapsari dkk, (2020:2) Inflasi merupakan kenaikan harga secara

umum dan terus menerus dalam satu periode tertentu. Apabila tingkat inflasi tinggi dalam suatu perekonomian maka akan mengakibatkan perubahan-perubahan output, kesempatan kerja, dan dapat mengakibatkan pengangguran. Salah satu indikator kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah yaitu dapat dilihat dari angka PDRB.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa tingkat inflasi yang secara terus menerus naik didasarkan pada sistem kerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Kenaikan inflasi sangat berpengaruh positif terhadap perubahan tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan bahkan bisa mempengaruhi sistem upah.

Upah adalah sumber penghasilan, bila sumber penghasilan turun atau tetap maka kesejahteraan juga turun atau tetap dan itu juga pasti akan mempengaruhi tingkat kemiskinan. Upah yang diberikan nyatanya secara riil nilainya cukup rendah meskipun secara nominal angkanya cukup tinggi, (Shinta Setia Ningrum, 2017:2)

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau industri untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerja, (Anggriawan, 2016:219-220)

Penelitian yang dilakukan oleh warapsari Dk, (2020:2) Upah merupakan suatu imbalan yang diberikan dari perusahaan ke karyawan yang diperoleh dari hasil kerja keras yang telah dilakukan selama bekerja.

Kesimpulan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa upah minimum sangat berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang dimana jika pendapat masyarakat tinggi maka akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat juga ikut tinggi, sedangkan kalau pendapatan masyarakat rendah daya beli masyarakat juga ikut turun.

Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu dan merupakan

ketidakmampuan bagi seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum karena disebabkan oleh pendapatan yang masih rendah dan belum mampu untuk mencukupi seluruh kebutuhan hidup yang mendasar seperti untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya (Sinta Ariska, 2021).

Menurut R.Susanto dan I.Pangesti (2020:3) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (pakaian dan sebagainya) yang bersifat mendasar. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang (perkapita) per bulan di bawah garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar tidak hanya digunakan oleh Indonesia, tetapi digunakan juga oleh negara-negara lain, seperti: Amerika, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, dan Gambia.

Menurut Ramadan Amar dkk, (2017:2) Kemiskinan merupakan masalah sosial yang senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemiskinan juga merupakan masalah sosial yang senantiasa relevan untuk dikaji secara terus-menerus, bukan saja karena masalah kemiskinan telah ada sejak lama, melainkan karena hingga kini kemiskinan belum bisa dientaskan dan bahkan gejalanya semakin meningkat sejalan dengan krisis multidimensional yang terjadi.

Dengan demikian kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup dibidang ekonomi dan keadaan dimana tidak bisa mengikuti trend atau tuntutan jaman.

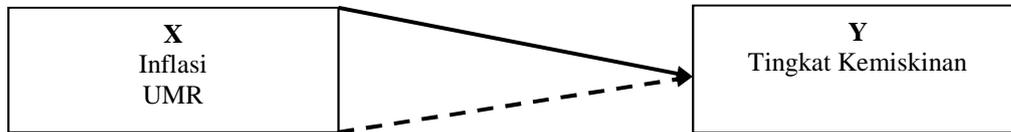
METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan jenis penelitiannya adalah eksplanasi untuk menjelaskan ada tidaknya pengaruh variable bebas yakni inflasi dan upah

minimum regional (UMP) terhadap tingkat kemiskinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik

(BPS) Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 12 Kecamatan di Kabupaten Ngada. Adapun rancangan penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1 Bagan Rancangan Penelitian

Keterangan:

- ▶ : Pengaruh secara parsial
- - -▶ : Pengaruh secara simultan

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan memperoleh data dari BPS Kabupaten Ngada 5 tahun terakhir (2016-2020). Data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh inflasi dan upah minimum regional (UMR) terhadap tingkat kemiskinan. Dalam analisis regresi berganda terdapat beberapa komponen dalam menganalisis pengaruh variabel bebas yakni inflasi dan UMR terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngada. Komponen tersebut diantaranya: uji T, uji F, dan uji R Square. Uji statistik T, pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) inflasi dan UMR terhadap variabel terikat (Y) tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Tahun 2016-2020. Uji F pada dasarnya digunakan

untuk membuktikan pengaruh secara bersama-sama statistik bahwa seluruh variabel independen yaitu Inflasi Dan Upah Minimum Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Dari Tahun 2016-2020. Uji R^2 bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik variasi variabel dependen. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*), digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien determinasi (R^2) merupakan angka yang memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam variabel tak bebas (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (X) (Gujarati. 2004:163)

PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari BPS dan olah data yang menggunakan program SPSS diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil analisis regresi linear berganda

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		Beta		
	B	Std. Error				
1	(Constant)	84618.970	48062.943		1.761	.220
	INFLASI (X1)	4386.046	4733.523	.181	.927	.452
	UPAH (X2)	.141	.025	1.110	5.684	.030

a. Dependent Variable: PEND.MISKIN (Y)

Dari tabel 1 diperoleh persamaan regresinya yang dilihat pada kolom B sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

$$= 84618.970 + 4386.046X_1 + 0.141X_2$$

Ketrangan:

- Y = kemiskinan
a = konstanta
b1, b2, = koefisien regresi
X1 = inflasi
X2 = upah

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut ;

1. Konstanta sebesar 84.618,970 artinya jika inflasi dan upah bertambah 1 persen, maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 84.618,970 persen. Dan tanda positif artinya jika inflasi dan upah bertambah maka akan menambah kemiskinan.

2. Koefisien variabel X1 (Inflasi), sebesar 4.386.046, artinya jika inflasi bertambah 1 persen maka kemiskinan akan meningkat sebesar 4.386,046 persen. Koefisien variabel X1 (Inflasi) bernilai positif artinya, terjadi hubungan yang searah antara inflasi dengan kemiskinan. Semakin bertambah inflasi maka semakin meningkat pula kemiskinan.
3. Koefisien variabel X2 (Upah), Sebesar 0,141 artinya jika upah bertambah 1 persen maka kemiskinan akan menurun sebesar 14,1 persen. Koefisien variabel X2 (upah) bernilai positif artinya, terjadi hubungan yang searah antara upah dan kemiskinan. Semakin meningkat upah maka semakin menurun pula kemiskinan.
4. Semakin meningkatnya inflasi dan upah maka kemiskinan pun ikut meningkat

Tabel 3
Hasil analisis korelasi dan analisis determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983 ^a	.966	.932	6928.96158

a. Predictors: (Constant), UPAH (X2), INFLASI (X1)

Berdasarkan tabel 2 hasil analisis korelasi berganda menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara inflasi dan upah terhadap kemiskinan yang ditunjukkan dengan nilai R sebesar 0,983. Menurut Sugiyono (2007) interpretasi koefisien korelasi rentangan 0,60 – 0,799 masuk dalam kategori kuat.

Analisis determinasi bertujuan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2)

secara serentak terhadap variabel dependen (Y). seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kemiskinan) terhadap variabel dependen (inflasi dan upah) dilihat dari nilai R square dari tabel 2 yakni sebesar 0,966 atau sebesar 96,6 persen sedangkan sisanya sebesar 4,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diungkapkan dalam model penelitian ini.

Tabel 4
Hasil Uji f

		ANOVA ^b				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.725E9	2	1.362E9	28.379	.034 ^a
	Residual	9.602E7	2	4.801E7		
	Total	2.821E9	4			

a. Predictors: (Constant), UPAH (X2), INFLASI (X1)
b. Dependent Variable: PEND.MISKIN (Y)

Uji F atau dengan kata lain uji koefisien regresi secara bersama-sama bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 3

diperoleh F hitung sebesar 28,379 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen atau $\alpha=5$ persen (uji dua sisi), nilai F tabel sebesar 9,55 dengan demikian terdapat pengaruh secara signifikan antara inflasi dan upah terhadap kemiskinan.

Tabel 5
Hasil uji t

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	84618.970	48062.943		1.761	.220
	INFLASI (X1)	4386.046	4733.523	.181	.927	.452
	UPAH (X2)	.141	.025	1.110	5.684	.030

a. Dependent Variable: PEND.MISKIN (Y)

Tujuan dilakukan uji validitas uji t adalah untuk mengetahui pengaruh parsial antar variabel dependen terhadap variabel independen atau apakah ada pengaruh antara inflasi terhadap kemiskinan, apakah ada pengaruh antara upah terhadap kemiskinan.

Berdasarkan tabel 4 diperoleh nilai t hitung untuk koefisien inflasi sebesar 0,927 dan koefisien upah sebesar 5,684. Nilai t tabel dengan derajat kepercayaan 95 persen atau $\alpha=5$ persen (uji dua sisi) sebesar 4,303. Dengan demikian koefisien variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap

kemiskinan karena hasil uji t tabelnya lebih kecil dari t hitungnya sedangkan koefisien variabel upah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Hasil analisis di atas menunjukkan adanya pengaruh searah secara simultan antara inflasi dan upah terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan inflasi dan upah dapat berpengaruh terhadap kemiskinan. Mengacu pada data penduduk miskin yang diperoleh dari BPS Kabupaten Ngada yang tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata penduduk miskin sebanyak 327,756 jiwa, dengan tingkat upah juga naik walaupun

kenaikannya tidak begitu drastis dengan rata-rata kenaikan Rp 1.671.000 dan inflasi yang bervariasi turun naik setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan 1,766.

Kabupaten Ngada saat ini masih memiliki jumlah penduduk miskin yang begitu banyak jumlahnya. Ada beberapa faktor pemicu jumlah penduduk miskin yakni keterbatasan SDA, SDM bahkan sistem cara kerja pemerintah dalam pengelolaan penentuan inflasi dan upah minimum yang menjadi tolak ukur kemajuan sistem ekonomi masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Alaniez yang dikutip dari (Ariska 2021), Alaniez menyatakan perubahan dalam upah minimum mempengaruhi upah pekerja yang mendekati upah minimum. Hubungan antara upah minimum dan pendapatan rumah tangga menemukan peningkatan upah minimum dapat mengurangi kemiskinan.

Tingkat inflasi dan upah yang mempengaruhi kemiskinan terletak pada daya beli masyarakat. Masyarakat dikatakan mampu jika hidup sesuai tuntutan jaman yang didasarkan pada keinginan dan kemampuan untuk membeli. Masyarakat yang pendapatan bagus tentu daya belinya berbeda dengan masyarakat yang pendapatannya kurang. Seperti yang dikutip R Susanto (2020) mengatakan Apabila inflasi meningkat, maka tingkat kesejahteraan menjadi terganggu, yakni daya beli masyarakat menurun. Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk melihat/mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana kesejahteraan masyarakat ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan.

Hasil analisis secara parsial dari masing-masing variabel antara variabel inflasi terhadap kemiskinan dan variabel upah terhadap kemiskinan tidak bersama-sama mempengaruhi kemiskinan, dimana penelitian ini hasilnya menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan upah berpengaruh

terhadap kemiskinan.

Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, inflasi hanya sebagai kenaikan harga. Jika masyarakat memiliki pendapatan atau upah yang tinggi maka inflasi bukanlah sebuah tolak ukur dalam menentukan ada atau tidaknya pengaruh terhadap kemiskinan.

Seperti yang dikatakan oleh Mustakin dan Dkk yang dikutip dari Ariska Dkk (2021), Mustakin mengatakan bahwa inflasi tidak mempengaruhi kemiskinan, karena adanya kondisi dan situasi dimana daya beli masyarakat dalam suatu daerah bersifat heterogen atau tidak sama sehingga akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

Sedangkan upah berpengaruh terhadap kemiskinan dimana Meningkatnya upah minimum juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan karena para tenaga kerja mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup yang mendasar seperti untuk konsumsi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaufman yang dikutip dari jurnal Ariska Dkk (2021), Kaufman mengatakan tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan terbebas dari kemiskinan.

Berdasarkan kurva Phillips yang dikutip dari Ulva (2021) mengatakan semakin tinggi tingkat upah maka tingkat pengangguran rendah. Jadi diantara pengangguran dengan tingkat upah secara teori jelas terdapat keterkaitan atau

hubungan yang timbal balik. Dari pernyataan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tingginya upah maka tingkat pengangguran akan menurun yang berdampak pada kemiskinan juga yang semakin berkurang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Upah minimum regional mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau positif terhadap kemiskinan Di Kabupaten Ngada, ini berarti jika upah minimum Di Kabupaten Ngada mengalami kenaikan maka akan mengurangi penduduk miskin di kabupaten ngada sedangkan inflasi mempunyai pengaruh yang negatif terhadap kemiskinan Di Kabupaten Ngada hal ini menandakan naik turunnya inflasi Di Kabupaten Ngada sangat tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Di Kabupaten Ngada.

Saran

Dalam meningkatkan penetapan upah minimum regional langkah konkret kebijakan ekonomi yang dilakukan adalah peningkatan pendapatan masyarakat, dengan memperluas lapangan kerja maka pengangguran berkurang dan pendapatan (upah) masyarakat meningkat. Selain itu, dalam menetapkan upah minimum pemerintah harus memperhatikan tingkat inflasi, karena kenaikan inflasi tidak sebanding dengan kenaikan upah nominal. Pemerintah hendaknya memberikan subsidi kepada perusahaan guna menekan biaya produksi sehingga perusahaan dapat menekan biaya produksi yang menjadikan harga output stabil atau menurun. Sehingga inflasi dapat dikendalikan dan upah nominal sebanding dengan upah riil yang diterima.

Daftar Pustaka

Ariska, S., & Sentosa, S. U. (2021). Pengaruh Inflasi, Pendidikan dan Upah Terhadap Kesempatan Kerja dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal*

Variabel upah berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan, Yang artinya upah menjadi tolak ukur kemakmuran masyarakat yang didasarkan pada daya beli dan tuntutan untuk hidup menyesuaikan perkembangan zaman.

Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 3(3).

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Indonesia 2021. <https://www.bps.go.id/publication/2021/02/26/938316574c78772f27e9b477/statistik-indonesia-2021.html>

Badan Pusat Statistik. (2021). Kabupaten Ngada Dalam Angka 2021. <https://ngadakab.bps.go.id/publication/2021/02/26/19586546ab5ca6b688ecb0/kabupaten-ngada-dalam-angka-2021.html>

Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Kesejahteraan Kabupaten Ngada 2021. <https://ngadakab.bps.go.id/publication/2021/12/28/d7ce15e69b7aa46947d144f0/statistik-kesejahteraan-rakyat-kabupaten-ngada-2021.html>

Bintang, S. Y., & Prana, R. R. (2020). Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Medan. *CiVITAS: Jurnal Studi Manajemen*, 2(2).

Rumate, V. A., & Engka, D. S. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal pembangunan ekonomi dan keuangan daerah*, 18(6).

Ma, S. H. G., Banda, Y. M., & Parera, H. R. (2019). Gaya Hidup dan Perilaku Konsumtif Rebonding Mahasiswi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Flores. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(2), 406-415.

Ningrum, S. S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun

- 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184-192.
- Octasari, T. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Tingkat Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2009-2013. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(6), 495-502.
- Ramadhan, D. A., Setyadi, D., & Wijaya, A. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran dan kemiskinan di kota samarinda. *Inovasi*, 13(1), 1-18.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271-278.
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Boedirochminarni, A. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 4(2), 194-207.